



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 8688-8702

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Budaya Literasi Di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

I Kade Adhi Oka Sujaya^{1✉}, Fernandes Simangunsong², Ahmad Averus Toana³

Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: ikadeaokasujaya@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian yang peneliti laksanakan ini, berangkat dari masalah budaya literasi yang rendah dari masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dan tindakan yang dilakukan terhadap hal tersebut melalui kolaborasi oleh para pemangku kepentingan, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur bersama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Anak Sumba dan didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan di Sumba Timur. Menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansel dan Gash sebagai alat analisis yang menitikberatkan pada dimensi proses kolaborasi sebagai inti dari teori ini, dan dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, sebagai pendukungnya. Selanjutnya, mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari *collaborative governance* dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur, dan menghasilkan upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif, dengan peneliti sebagai instrument penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, teknik *purposive sampling* untuk pemilihan informan,

analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang ditunjang oleh triangulasi sumber untuk keabsahan data.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kolaborasi yang dijalankan, masih kurang efektif. Hal ini terlihat pada tahapan kondisi awal yaitu ketidakseimbangan sumber daya, dimana sumber daya yang dibutuhkan yaitu sumber daya personil, sumber daya keuangan, serta sumber daya sarana prasarana, masih rendah kuantitas dan kualitasnya. Serta menganalisa upaya yang dihasilkan untuk mengatasi faktor penghambat, melalui upaya langsung dan upaya tidak langsung.

Kata kunci : *Collaborative governance, kolaborasi, budaya literasi, Sumba Timur*

Abstract

The research that the researchers carried out departed from the problem of low literacy culture from the community in East Sumba Regency and the actions taken on it through collaboration by stakeholders, namely the East Sumba Regency Library and Archives Office with the Cahaya Anak Sumba Community Learning Activity Center (PKBM) and supported by community leaders and education leaders in East Sumba. Using Ansel and Gash collaborative governance theory as an analytical tool that focuses on the dimensions of the collaboration process as the core of this theory, and the dimensions of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, as support. Furthermore, describe the supporting and inhibiting factors of collaborative governance in improving literacy culture in East Sumba Regency, and produce efforts to overcome existing inhibiting factors. The methods used in this study are descriptive qualitative, with researchers as research instruments, data collection techniques using interviews, documentation, and observation, purposive sampling techniques for informant selection, data analysis through reduction, presentation, and drawing conclusions supported by source triangulation for data validity. The results showed that the collaboration carried out was still ineffective. This can be seen in the initial condition stage, namely resource imbalance, where the resources needed, namely personnel resources, financial resources, and infrastructure resources, are still low in quantity and quality. As well as analyzing the resulting efforts to overcome inhibiting factors, through direct efforts and indirect efforts.

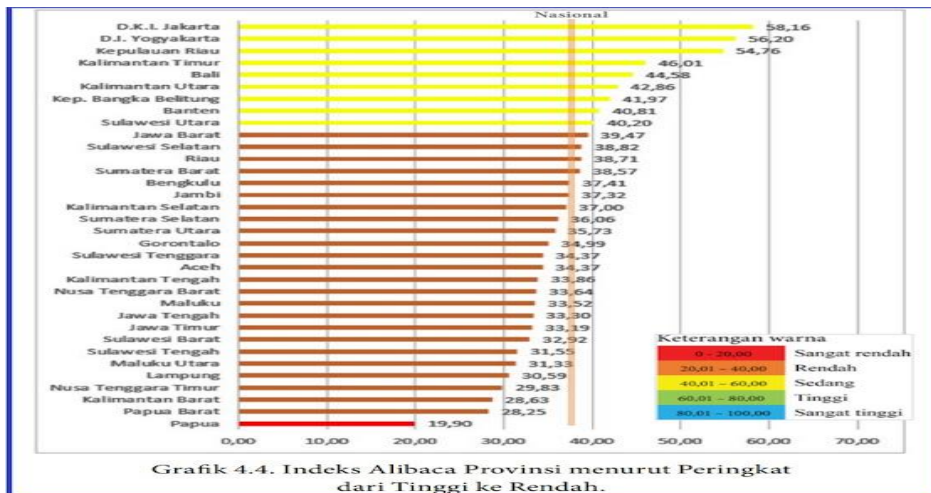
PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin maju dan berkembang, dibutuhkan individu maupun masyarakat dengan tingkat literasi yang tinggi untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan kemajuan yang ada, karena dengan tingkat literasi masyarakat yang tinggi akan menentukan kualitas sumber daya manusianya dan kualitas suatu bangsa. Dengan kata lain, rendahnya tingkat literasi masyarakat suatu bangsa sangat mempengaruhi kemampuan suatu bangsa mengikuti dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi di dunia, yang mana akan berdampak pada ketertinggalan bangsa itu sendiri baik dari segi pembangunan, ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan lain sebagainya. Hal ini merupakan tanggung jawab negara baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga semua komponen bangsa untuk menjawabnya, apalagi dikaitkan dengan amanat konstitusi kita yang menyatakan bahwa negara berkewajiban "mencerdaskan kehidupan bangsa" (Alinea keempat Pembukaan UUD 1945). Kemajuan suatu bangsa menuntut pemberdayaan masyarakat kearah kemajuan pula. Budaya literasi tidak terbatas pada kalangan akademis tertentu, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat yang ada. Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan *Program for International Student Assessment (PISA)* yang di rilis *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* pada 2019.

Wahyuni, S. (2009) Total jumlah bahan bacaan dengan total jumlah penduduk Indonesia memiliki rasio nasional 0,09. Artinya satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun, sehingga memiliki tingkat terendah dalam indeks

kegemaran membaca. Pada Mei 2019 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan buku Indeks Aktivitas Literasi Membaca atau Alibaca tingkat provinsi. Berikut adalah Indeks Alibaca Provinsi menurut peringkat dari tinggi ke rendah :

Gambar 1 Indeks Aktivitas Literasi Provinsi di Indonesia Tahun 2019



Sumber : goodnewsindonesia.id, diakses tanggal 31 Oktober 2020 jam 21.17

Dari seluruh provinsi di Indonesia tidak ada satupun provinsi yang tingkat literasinya berada pada kategori tinggi maupun sangat tinggi. Hanya 9 provinsi yang masuk kategori sedang dari 34 provinsi, sedangkan provinsi lainnya berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sebagai tempat penulis melakukan penelitian, menempati peringkat 31 dari 34 provinsi dengan tingkat literasi yang rendah.

Data Susenas 2016 menunjukkan bahwa tingkat literasi anak usia 15 tahun ke atas di Nusa Tenggara Timur adalah 91,52 persen. Ini berarti bahwa 8,48 persen dari kelompok umur ini masih buta huruf. Kabupaten Sumba Timur sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi penyumbang angka literasi yang rendah untuk tingkat nasional. Taman Bacaan Pelangi (2019) Angka literasi

yang rendah di daerah Sumba juga dibuktikan oleh data Indonesia National Assesment Program (INAP) yang menyebutkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki skor kebahasaindonesiaan 34,4, nilai ini berada jauh di bawah nilai rata-rata nasional yaitu 39,3 dan tentunya ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi semua pihak.

Tabel 1 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Mampu Membaca dan Menulis di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Mampu Membaca dan Menulis (Persen)	Tidak Mampu Membaca dan Menulis (Persen)
1	2016	90,54	9,46
2	2017	90,65	9,35
3	2018	89,52	10,48
4	2019	90,11	9,99
5	2020	93,87	6,13

Sumber : BPS Kab. Sumba Timur 2020 (Dikelola penulis)

Dalam rangka meningkatkan budaya literasi, prosesnya pada masa sekarang ini, idealnya dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak. Dengan adanya keterlibatan banyak pihak atau pemangku kepentingan yang terkait, dapat lebih mempercepat proses untuk meningkatkan budaya literasi yang berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah membangun kerjasama dengan lembaga non pemerintah atau *Non Governmental Organization (NGO)* yang memiliki perhatian dalam masalah literasi di kabupaten Sumba Timur yakni melakukan kolaborasi dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan nama "Cahaya Anak Sumba".

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian *collaborative governance* dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni metode kualitatif deskriptif. Simangunsong (2016:190) mengemukakan bahwa setiap penelitian kualitatif pemerintahan, bentuk desain penelitian dapat bervariasi, disesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang memiliki sifat *emergent* dimana fenomena tiba-tiba muncul apa adanya sesuai dengan prinsip alami. Selanjutnya Simangunsong (2016:191) memberikan beberapa ciri khusus kerangka kerja penelitian kualitatif, yakni :

- (1) Menggunakan lingkungan alamiah, agar sumber data yang diperoleh secara langsung bersifat naturalistik;
- (2) Manusia atau peneliti sebagai alat pengumpul data yang utama;
- (3) Analisis data bersifat induktif;
- (4) Teori yang dikembangkan bersifat *grounded theory*, artinya teori yang dikembangkan muncul dari bawah ke atas dan dibangun dengan bukti atau data yang saling berhubungan;
- (5) Data penelitian bersifat deskriptif, bukanlah angka-angka atau hasil reduksi data ke dalam simbol numerik;
- (6) Hasil penelitian bersifat subyektif dan lebih mementingkan proses daripada hasil;
- (7) Mendalamnya penelitian kualitatif, seringkali mendorong peneliti untuk melakukan pembatasan pada fokus penelitian;
- (8) Keabsahan data dalam bentuk triangulasi data (*check, re-check dan cross check*);
- (9) Desain penelitian bersifat sementara dan terus berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan;
- (10) Hasil yang sempurna agar dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dengan sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan program maupun kegiatannya yang dijalankan sendiri oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak berjalan dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Merujuk dari data LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021, Indikasinya terlihat dalam capaian target atau realisasi dari Program Pembinaan Perpustakaan pada akhir tahun 2021 yang tidak mencapai setengah atau 50% dari target- target yang ditetapkan, sesuai Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021. Kaitannya dengan keadaan tersebut, terdapat 3 (tiga) dimensi yang menjadi syarat awal suatu kolaborasi dibangun menurut Ansell dan Gash dalam Islamy yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif, yang mendorong para pemangku kepentingan melakukan kolaborasi guna mencapai tujuan yang diinginkan secara lebih baik dan bermanfaat baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat Sumba Timur itu sendiri.

1. Kondisi Awal

Rendahnya budaya literasi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil survei antara lain, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019 maupun data hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan masyarakat karena masalah tersebut memberikan dampak yang cukup serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemajuan pembangunan daerah. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam kondisi awal *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash yaitu :

a. Adanya Ketidakseimbangan Sumber Daya

Ketidakseimbangan sumber daya dari para aktor kolaborasi bahwa baik dari sisi pemerintah daerah yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur maupun PKBM Cahaya Anak Sumba memiliki kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kolaborasi yang dibangun.

b. Ketersediaan Insentif untuk Berpartisipasi

Dengan kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia sarana prasarana, maupun anggaran, kolaborasi yang dibangun menjadi solusi untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dengan dilandasi oleh niat, komitmen, dan kepedulian yang sama untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur.

c. Adanya Ketakutan Terjadi Konflik

Kolaborasi dapat berjalan karena adanya kesadaran akan rasa saling membutuhkan dan ketergantungan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kemungkinan akan terjadinya konflik bisa saja terjadi, sehingga untuk mencegah hal tersebut perlu dibangun relasi yang baik melalui komunikasi dan keterbukaan dari para pemangku kepentingan yang terkait.

2. Desain Kelembagaan

Dalam hal ini, berkolaborasi dengan PKBM Cahaya Anak Sumba serta bersama tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan di Sumba Timur, dengan merujuk pada kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang melekat pada masing – masing stakeholder tersebut tanpa disusun atau diatur dalam sebuah struktur tertentu. Selanjutnya, dimensi kelembagaan berdasarkan model *collaborative governance* Ansel dan Gash meliputi : partisipasi, aturan dasar, dan keterbukaan.

a. Partisipasi

Hal ini juga sejalan dengan pandangan dari Goddars (2006), lewat tulisannya yang berjudul *“Third Sector in Partnership Arrangements”*, mengemukakan ada lima sifat kunci relasi kemitraan pemerintah dan non-pemerintah. Pertama terkait dengan saling percaya dan kesejajaran kedudukan, serta *resiprositas* atau saling membutuhkan. Kedua adalah rasa saling percaya (*trust*) untuk mencapai tujuan. Ketiga yaitu adanya manfaat dari kerjasama. Keempat adalah lewat pengaturan tercipta keadilan (*equity*) dan pembagian kekuasaan (*shared power*), dan kelima adanya komitmen dan transparansi dalam sumber daya yang dimiliki.

b. Aturan Dasar

Ansel dan Gash dalam Islamy (2018) mengatakan salah satu faktor penting dalam kolaborasi yang harus diperhatikan adalah kejelasan aturan dan secara konsisten dilakukan, dilandasi oleh relasi yang menguntungkan bagi para aktor, serta memiliki tujuan yang sama. Aturan formal yang berlaku, kolaborasi dibangun dan dijalankan secara bertanggungjawab oleh para aktor dan aturan tersebut merupakan jaminan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Namun dalam implementasi kolaborasi, para aktor menjalankan perannya berdasarkan posisinya masing – masing tanpa adanya aturan tertulis terkait pembagian peran yang tegas dalam kolaborasi, dan hanya dibuat serta disepakati secara lisan.

c. Keterbukaan

Keterbukaan yang ada pada para pemangku kepentingan dalam kolaborasi dilakukan tidak hanya pada tataran masalah dan tujuan serta landasan kolaborasi, tetapi lebih daripada itu, masuk sampai pada kepada kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Melalui keterbukaan, pemahaman dan rasa percaya yang sama juga dapat dibangun.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Copyright@ I Kade Adhi Oka Sujaya , Fernandes Simangunsong, Ahmad Averus Toana

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur mampu menjadi pemimpin yang fasilitatif yang ditunjukkan lewat tindakan dan pengaruhnya terhadap semua pihak yang terlibat dan diakui serta diterima dengan baik oleh semua yang ikut dalam proses kolaborasi. Pemimpin yang baik, sanggup menjembatani semua yang terlibat dengan segala kepentingannya, dapat duduk bersama untuk berunding, menerima masukan maupun keluhan, dan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan.

Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi sebagai inti dari model *collaborative governance* Ansell dan Gash dalam Islamy (2018), diawali dari dialog tatap muka (*face to face dialogue*), yang dapat menghasilkan sebuah keputusan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, selanjutnya membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen pada proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*). Dalam dialog tatap muka, proses menuju kesepakatan kadang kala tidaklah mudah, tetapi dengan kehadiran pemimpin dan keterlibatan semua pihak dengan komitmen dan keterbukaan yang dibangun, diharapkan kesepakatan bersama dapat dihasilkan.

a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dialog yang terbangun dari para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sumba Timur sudah berjalan cukup baik dan menjadi jalan untuk membangun rasa percaya juga komitmen. Dalam dialog tatap muka juga, pemahaman dan keputusan-keputusan dibuat melalui komunikasi yang berlangsung dua arah, namun pertemuan yang dilakukan belum dibuat secara rutin atau masih bersifat insidental.

b. Membangun Kepercayaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur bersama para aktor lainnya, selain membangun rasa percaya, juga harus mampu menjaga dan memelihara kepercayaan yang sudah dibangun bersama para pemangku kepentingan lainnya sebagai modal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi. Segala sesuatu yang muncul atau didapat, harus dibicarakan dan di *shared* secara bersama, sehingga tidak mencederai kepercayaan yang sudah terbangun dalam proses kolaborasi.

c. Komitmen Pada Proses

Dalam usaha untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur, komitmen dibangun diatas rasa saling percaya dan keterbukaan dari para pihak yang terlibat melalui komunikasi dan tindakan yang berjalan dengan baik. Namun menjaga komitmen itu tetap hidup, masih menjadi tantangan tersendiri bagi para aktor karena berbagai faktor, seperti faktor usia dan motivasi sehingga dibutuhkan usaha bersama dari para aktor untuk saling menopang dan mendukung satu dengan yang lain lewat pemberian motivasi dan rasa perhatian.

d. Saling Memahami

Berangkat dari masalah budaya literasi masyarakat yang masih rendah yang harus diselesaikan, serta kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumba Timur maupun PKBM Cahaya Anak Sumba, mendorong mereka untuk menjalin kolaborasi dan membuka diri untuk bersama – sama terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Masalah yang juga muncul adalah masyarakat Sumba Timur yang belum semuanya mengetahui dan memahami usaha yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan bagi kemajuan sumber daya manusia lewat budaya literasi.

e. Hasil Sementara

Kelebihan, kekurangan, serta keterbatasan yang dimiliki oleh para *stakeholder*, dapat disikapi dan berusaha dikelola dengan baik secara bersama

– sama. Kelemahan dalam pelaksanaan dari *collaborative governance* dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur terlihat dari kurang dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholder*, dan forum dialog yang belum terjadwal dengan baik. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari tahapan kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi.

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Budaya Literasi di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. Upaya Langsung

Poerwadarminta (1991) menjelaskan bahwa upaya adalah usaha menyampaikan maksud, akal, dan pandangan terhadap suatu hal agar lebih bernilai serta bermanfaat untuk mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan. Hal ini berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang dan mendukung proses kearah pencapaian maksud dan tujuan dimaksud. Dari pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah sebuah proses yang harus dilalui dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal guna meraih tujuan yang telah ditetapkan.

B. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di bidangnya adalah salah satu sumber daya yang penting yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga atau organisasi.

Lewat kegiatan tersebut, SDM aparatur yang ada dapat lebih berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

C. Peningkatan Anggaran

Alokasi anggaran yang dibutuhkan tersebut, untuk menjalankan program dan kegiatan, memiliki dampak langsung kepada masyarakat, salah satunya untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Disini juga terlihat peran kepemimpinan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur dalam membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan Perpustakaan Nasional, sehingga di tahun 2023 Kabupaten Sumba Timur direncanakan akan mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan perpustakaan dan sarana prasarana penunjang lainnya.

D. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Adanya pemahaman dan usaha secara kolektif terkait masalah sarana prasarana yang harus dibenahi dan ditingkatkan dalam mengelola dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar bagi masyarakat dan dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur, memudahkan para pengambil keputusan untuk berkomunikasi dan mencari solusi untuk masalah tersebut, yaitu dengan jalan memberikan alokasi anggaran yang mendukung pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perpustakaan. Selain itu, dengan adanya pembangunan 89 unit *Base Transceiver Station (BTS)* dan 1 (satu) *Point of Interconnection (POI)* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, untuk perluasan akses jaringan internet di Sumba Timur menjadi dukungan tambahan untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur.

E. Pembuatan Regulasi Daerah

Kebutuhan akan aturan yang lebih mengikat di daerah terkait dengan literasi, selain wujud keseriusan pemerintah daerah dan tindaklanjut peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga lebih kepada memberi arah, gambaran, serta dukungan yang lebih jelas tentang kondisi serta prioritas pembangunan yang hendak dicapai. Terlebih khusus kepada usaha untuk meningkatkan budaya

literasi masyarakat, sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia Sumba Timur yang lebih maju dan berkualitas.

Upaya Tidak Langsung

Koordinasi Antar Lembaga Teknis Terkait

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur bersama pemangku kepentingan yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan juga sebagai bentuk hubungan kerjasama dalam tubuh birokrasi itu sendiri sebagai satu kesatuan penyelenggara pemerintahan di daerah. Koordinasi senantiasa diperlukan oleh instansi atau lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar dapat saling bersinergi untuk mencapai suatu tujuan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang lebih besar.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan pembahasan yang dikemukakan penulis menarik kesimpulan yang terkait dengan pembahasan yang dilakukan yaitu, *Collaborative Governance* dalam meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Sumba Timur belum berjalan efektif berdasarkan pendekatan yang dilakukan melalui teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash. Dimana sumber daya yang dimiliki oleh para aktor kolaborasi, baik itu sumber daya manusia yang masih kurang dan terbatas dari segi kualitas dan kuantitasnya, ketersediaan sumber daya keuangan yang masih kurang dan terbatas, maupun sarana prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung proses kolaborasi yang dilakukan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Goddard, Jodi. 2006. *Third Sector in Partnership Arrangements, Navigating New Water or Treading Water? Presented at Australia and new Zealand Third Sector Research Eight Biennial Conference. Adeliede.*
- Islamy, L.O.S. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi.* Deepublish, Yogyakarta.
- Poerwadarminta. 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung. CV.Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2009). Menumbuhkan Minat Baca Menuju Masyarakat Literat. Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (Online), Volume 16 (2), 11 halaman. Tersedia : <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/diksi> (30 September 2021)
- Profil PKBM Cahaya Anak Sumba
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020
LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021
- Luthfi, W.(2020, 17 Februari). Indeks Aktivitas Literasi Membaca Alibaca Provinsi. Goodnews Indonesia (online). Halaman 2. Tersedia: <https://www.goodnewsindonesia.id>. Diakses Tanggal 23 Oktober 2021